

BAB V

KESIMPULAN

Serangkaian peristiwa membawa Indonesia merdeka dicelah kosongnya kekuasaan. Syahrir seorang politikus yang revolusioner merupakan sosok paling tepat untuk melengkapi jalannya pemerintahan Soekarno-Hatta. Pemikiran Syahrir dalam politik Indonesia menjadi sorotan terutama bagi para pemuda. Syahrir memiliki dasar yang kuat dan konsisten dalam menjalankan kebijakannya. Sutan Syahrir terus berusaha untuk melepaskan Indonesia dari jeratan kolonialisme dan fasisme. Melalui politik Syahrir berusaha mewujudkan kebebasan rakyat dan membangkitkan kembali semangat perjuangan rakyat Indonesia.

Sutan Syahrir memasuki pemerintahan Indonesia dan mulai menjalankan peran pertamanya sebagai pemimpin Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk dengan tujuan membantu tugas presiden untuk sementara sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Selama masa jabatannya sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Syahrir berhasil mengubah kedudukan KNI-P dari hanya pembantu presiden menjadi badan legislatif. Dengan ini maka kekuasaan presiden dibatasi dan dapat terhindar dari adanya kediktatoran yang dianggap Syahrir sebagai cerminan dari fasisme.

Selain itu, pendirian KNIP dianggap sebagai usaha untuk menghapus anggapan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan pemberian Jepang. Syahrir berusaha memperluas kesempatan rakyat Indonesia untuk memasuki dunia politik

melalui usulan pembentukan partai politik yang disetujui Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Tujuan Syahrir untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan berkedaulatan rakyat juga diwujudkan dengan kebijakan pendirian partai-partai politik sebagai tempat aspirasi rakyat dari berbagai golongan. Hal ini membuat kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka semakin kuat. Selanjutnya atas usulan Syahrir maka KNIP menyetujui adanya perubahan bentuk kabinet dari presidensil menjadi parlementer. Keputusan ini sejalan dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah Nomor 14 mengenai perubahan bentuk kabinet. Syahrir diangkat menjadi perdana menteri pertama Indonesia pada masa itu. Perdana Menteri Syahrir mulai menjalankan tugasnya dan memilih jalan yang berbeda untuk menghadapi sekutu dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Kedatangan sekutu kembali ke Indonesia memaksa pemerintah untuk melakukan upaya guna mempertahankan status kemerdekaan dan wilayah Indonesia. Upaya yang dipilih Syahrir melalui perundingan. Dalam Kabinet Pertamanya Syahrir langsung mendapat kecaman dari berbagai pihak akibat upaya perundingan yang diambil Syahrir. Upaya ini dianggap merugikan bangsa Indonesia dan banyak menguntungkan pihak Belanda. Golongan ini memiliki jalan yang berbeda untuk mencapai kemerdekaan seratus persen. Para tokoh yang menentang keputusan Syahrir tergabung dalam pihak oposisi bernama Persatuan Perjuangan dibawah pimpinan Tan Malaka. Pihak oposisi mulai berusaha menjatuhkan Syahrir dengan mengajukan permohonan untuk membentuk kabinet baru dan program kerja baru kepada Presiden Soekarno. Hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan kabinet Syahrir I.

Ketidak-mampuan Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan untuk membentuk sebuah kabinet dalam waktu yang ditentukan membuat presiden Soekarno menugaskan kembali Syahrir untuk segera membentuk Kabinet Syahrir II. Dalam kabinet keduanya Syahrir mengubah formasi anggotanya menjadi lebih luas dengan melibatkan perwakilan berbagai partai. Usaha Syahrir dalam menjalankan kabinetnya guna mempertahankan kestabilan dan mendorong eksistensi Indonesia di mata dunia dalam masa-masa genting. Melalui kebijakan diplomasi, Sutan Syahrir berhasil menembus blokade yang dilakukan pihak Belanda. Berkat kemampuan dan kecerdasannya dalam diplomasi Syahrir berhasil mendesak Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Syahrir berhasil memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan wilayah Indonesia melalui perundingan serta merebut simpati dunia internasional sehingga melemahkan kedudukan Belanda di Indonesia. Penolakan dari golongan yang memiliki jalan perjuangan yang berbeda menjadi tantangan syahrir dalam menjalankan kabinetnya.

Syahrir tetap melanjutkan politik diplomasinya hingga masa jabatannya sebagai perdana menteri dalam Kabinet Syahrir III. Berbagai tantangan dihadapi mulai dari pertentangan dengan pihak oposisi, pertentangan dengan pihak militer hingga peristiwa penculikan yang menyebabkan pindahannya kekuasaan ketangan presiden. Keputusan Linggarjati pada saat Syahrir menjabat dalam Kabinet Syahrir III menimbulkan pro dan kontra yang menyebabkan hilangnya banyak dukungan terhadap Syahrir. Dengan ditariknya dukungan oleh banyak partai maka Syahrir memutuskan untuk meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri ditahun 1947.